

Kontruksi Pembangunan Wisata Taman Ganjaran Trawas Bagi Masyarakat Sekitar

Mochammad Barkah Fapag Dwitanto ¹⁾

1) Alumni Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi; e-mail : Mochammad.18066@gmail.com

ABSTRACT

Development is one of the government programs to provide adequate infrastructure for the surrounding community. Each individual living in the neighborhood has different meanings to revolution, especially in relation to the construction of facilities. One of the existing infrastructures in almost every city / district is a City Park. City park development has its own meaning for the community from social, economic and political aspects. Especially if the construction of a City Park seems to be causing new problems, such as what happened in Taman Ganjaran. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the development of Taman Ganjaran has the potential for a tourism village to be developed. The governance in developing the potential of a tourist village based in the village of Ketapanrame is proof that the village government can invite the community to work together in achieving common goals. From this it can be said that the village apparatus or village head in particular can give trust to the community which not all leaders can do.

Keywords: Development, Social Construction, City Park

PENDAHULUAN

Kota dapat didefinisikan sebagai ruang yang sifatnya kompleks, cenderung aspek dinamis dan menekankan ekonomi. Ini mengarah ke wilayah tersebut kota sedang mengalami perkembangan sangat cepat. Pembangunan wilayah kota cenderung secara fisik mengambil ruang terbuka dan menjadikannya sebagai area terbangun (Rahmy et al. 2012). Oleh karena itu, perlu digunakan tanah yang bagus sebagai pembatas antara kebutuhan ruang dikembangkan dengan kebutuhan ruang terbuka. Pembangunan perkotaan cenderung berfokus pada aspek industri. Pembangunan terbatas pada peningkatan ekonomi dan hanya pembangunan fisik, pembangunan di sektor industri terutama difokuskan pembangunan sosial ekonomi yang lebih diarahkan pada masalah kemiskinan, seperti upaya atau tindakan apa yang harus diambil untuk mengurangi kemiskinan masyarakat sehingga tidak jarang, isu pelestarian lingkungan cenderung diabaikan (Rukminto 2008).

Perkembangan tata ruang di seluruh Indonesia menurut otonomi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor, 32 Tahun ini 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi kegiatan pengaturan dan konstruksi, pelaksanaan dan supervisi penataan ruang, berdasarkan pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat penggunaan ruang yang berbeda. Oleh kewenangan sebagai pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, juga daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sumber daya sumber daya yang tersedia di wilayahnya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku terjadi, sehingga kawasan tersebut dapat diurus dengan jelas dan serius keseimbangan kualitas lingkungan. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang ditujukan untuk memelihara dan mengendalikan manajemen dan

penataan ruang. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini sangat dibutuhkan mengingat jumlahnya yang terus meningkat konversi fungsi tanah pada daerah resapan yang kemudian mulai dimanfaatkan sebagai Kawasan pemukiman tersebut menyebabkan ketidakseimbangan kualitas lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, mulai dari kenaikan suhu di perkotaan, kekeringan, dan banjir di daerah yang lebih rendah karena kurangnya daerah resapan di daerah atas. RTH pada dasarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan penataan ruang kota yang antara lain berfungsi sebagai kawasan resapan atau kawasan hijau taman kota dan paru-paru kota.

RTH yang ideal adalah keseimbangan koefisien pemanfaatan ruang memadai antara wilayah perkotaan dan pertumbuhan penduduk. Sesuai dengan konsep rencana Tata ruang terbuka hijau yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi utama (intrinsik) dan fungsi tambahan (ekstrinsik). Fungsi utama (intrinsik) adalah sebagai suatu fungsi ekologi, sedangkan fungsi tambahan (ekstrinsik) adalah fungsi arsitektural, ekonomi, dan sosial. Di perkotaan, fungsi ini harus tersedia menggabungkannya dengan kebutuhan dan kepentingan kota yang berkelanjutan. RTH fungsi ekologisnya adalah untuk menjamin keberlangsungan kawasan perkotaan fisik, yaitu suatu rencana bentuk, ukuran, dan bentuk yang pasti di kota. Fungsi tambahan untuk mendukung dan menambah nilai kualitas lingkungan perkotaan. Dengan cara itu Anda bisa terletak sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, seperti keindahan (taman), rekreasi (lapangan olahraga), dan pendukung lanskap perkotaan.

Pariwisata adalah industri yang memiliki kriteria khusus yang bisa menghasilkan efek positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus ini, memaksimalkan efek positifnya dan meminimalkan efek negatifnya diproduksi sehubungan dengan perencanaan pembangunan pariwisata diperlukan pariwisata dewasa. Kesalahan pada perencanaan dapat mengakibatkan munculnya berbagai jenis masalah dan benturan kepentingan antar pemangku kepentingan. Setiap daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda-beda membutuhkan solusi yang berbeda. Secara umum perencanaan pariwisata meliputi beberapa hal penting, seperti: (1) perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan mendorong pertumbuhan berbagai macam industri terkait pariwisata,, (2) perencanaan penggunaan lahan, (3) perencanaan infrastruktur terkait jalan raya, bandara, dan kebutuhan lain misal; listrik, air, pembuangan sampah, dll, (4) perencanaan pelayanan sosial yang relevan dengan menyediakan lapangan kerja, layanan kesehatan, pendidikan dan literatur sosial, dan. (5) perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk tujuan pariwisata dan turis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pembangunan taman Ganjaran, khususnya ditinjau dari kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Berger yang menjelaskan dalam teorinya tentang konstruksi sosial, kesadaran subyektif dibentuk atas dasar pengetahuan. Teori ini juga merupakan sosiologi pengetahuan. Berger mendasarkan pengetahuan pada kesadaran dan realitas berbentuk manusia. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari disusun menjadi pola dan menjadi tujuan sebelum manusia hadir. Meski terdapat perbedaan persepsi dan pendapat masing-masing individu, Berger beranggapan bahwa terdapat adaptasi makna yang konstan antar individu yang pada akhirnya membentuk kesadaran kolektif. Jadi ini disebut pengetahuan akal sehat. (Manuaba: 2008)

Beberapa penelitian relevan yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan judul Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. Metode yang diambil adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa problematika tata ruang digunakan untuk transformasi sosial. Tidak hanya untuk kepentingan kaum kapitalis, tetapi direkonstruksi untuk kepentingan publik. Pernyataan lain juga membuktikan jika penataan ruang kota Surabaya merupakan refleksi dari kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat. Selain itu, ruang yang diproduksi dilator belakang oleh kapitalis dan ekspresi ruang kota yang dipengaruhi oleh aspek produksi, konsumsi dan administrasi pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada tema penelitian yang lebih mengarah pada tata ruang kota yang dihubungkan dengan kelas kapitalis (Aminah: 2015).

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nadia Imansari dan Parfi Khadiyanta dengan judul Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan distribusi frekuensi. Hasil penelitian ini menyebutkan jika masyarakat Tangerang menginginkan RTH yang berfungsi sebagai paru-paru kota, wadah informasi dan rekreasi serta menginginkan RTH yang memiliki fasilitas yang memadai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari metode penelitian yang digunakan. Penulis memilih metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali informasi (Imansari: 2015).

Penelitian yang ketiga berjudul *Development of Social Infrastructure in the Management Practices of Local Authorities: Trends and Factors* dan ditulis oleh Elena V. Frolova dkk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membuktikan jika faktor sosial budaya dapat berfungsi sebagai sumber daya tarik investasi wilayah dan pengembangan infrastruktur sosial. Hasil penelitian dapat digunakan dalam aktivitas otoritas publik dalam merancang peraturan, praktik pemerintah daerah, dan pengembangan infrastruktur sosial (Frolova: 2016).

Penelitian keempat ditulis oleh Paulus Wirutomo dengan judul *Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Solo telah berhasil melakukan pembangunan yang ditinjau dari tiga aspek; struktural, cultural dan prosedural dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah. Metode pengumpulan data tidak hanya dengan wawancara, tetapi juga menghadiri FGD (Forum Group Discussion) yang dihadiri oleh pemerintah daerah dan pada pertemuan selanjutnya dihadiri oleh pedagang kaki lima. Sedangkan penulis hanya menggunakan teknik wawancara dan studi literatur (Wirutomo: 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian ini berangkat dari fenomena yang ada dan dianalisis secara ilmiah dengan tujuan untuk menjabarkan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan di Taman Ganjaran Trawas dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Subjek penelitian adalah tiga orang penduduk asli Trawas yang bertempat tinggal di sekitar Taman Ganjaran. Teknik pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diambil dari hasil literasi dari beberapa sumber tertulis seperti buku, koran, jurnal dan lain-lain. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, inferensi dan validasi data (Sugiyono: 2017).

Ada beberapa tahapan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Tingkatan menentukan objek penelitian

Pada tahap ini penulis menentukan objek dengan cara menguji potensi desa dalam masyarakat dan pemerintahan di Desa Ketapanrame

2. Operasi Lapangan, Awal

Tahap ini penulis melakukan observasi, observasi yang dimaksudkan adalah observasi lapangan ke Taman Wisata Ganjaran yang kini menjadi salah satunya ikon di Desa Ketapanrame dan pemerintah Desa Ketapanrame

3. Tingkat Identifikasi Masalah

Setelah melakukan observasi lapangan, ditemukan masalah dimana dalam pengembangan dan pengelolaan Wisata Ganjaran tidak akan terlepas dari pemerintah desa setempat, di mana keduanya bekerja sama untuk pengelolaan Wisata Desa Ganjaran. Kerjasama yang dimaksud adalah Masyarakat Desa Ketapanrame dan Pemerintah Desa Ketapanrame

4. Tingkat Pengumpulan. dan Manajemen Data

Memperoleh informasi yang sebenarnya ada di lapangan sehingga dapat melengkapi data. maupun informasi dan teori-teori yang tertulis di dalam literatur atau buku sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ketapanrame merupakan sebuah desa di daerah pegunungan yang berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Ketapanrame di bidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Lokasi Desa Ketapanrame merupakan desa paling terpencil di Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan Kabupaten Prigen, Kabupaten Pasuruan. Jarak dari pusat pemerintahan desa ke Kabupaten Trawas +0.5 km dan ke Kabupaten Mojokerto +45 km. Desa Ketapanrame terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Ketapanrame, Dusun Sukorame, dan Dusun Slep. Luas wilayah desa ini sekitar +345.460 Ha. Masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah ketersediaan kesempatan kerja yang tidak mencukupi dengan perkembangan populasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah bisnis pengembangan kesempatan kerja. Salah satunya dengan membangun Desa Wisata atau yang terbaru adalah Wisata Taman Ganjaran. Dengan banyak kondisi desa dikelilingi oleh villa keluarga dan pariwisata serta wisata, pembangunan lainnya Wisata Taman Ganjaran bisa dikatakan sangat efektif dalam perbaikan ekonomi masyarakat desa setempat.

Taman Wisata Ganjaran diresmikan. oleh Bupati Mojokerto pada tanggal 8 Desember 2018. Sebulan sebelumnya, pada 8 November, taman itu *launching* untuk stand foodcourt. Ini karena menurut perangkat desa apabila peluncuran dan peresmiannya bertepatan pada hari dan tanggal yang sama, jadi tidak akan ada kemajuan berkelanjutan. Wisata Taman Ganjaran terletak di jalur utama Mojokerto-Tretes. (Pasuruan). Nama Ganjaran berasal dari nama tempatnya. Tempat disebut sebagai tanah kas desa yang memiliki sebutan lain yang berarti pahala. Tanah Tanah inilah yang digunakan kas desa untuk membayar lebih. Selain itu, sejak awal alat Desa Ketapanrame telah melakukan hal itu Selama ini belum ada hasil yang optimal dari tanah tersebut karena nilai fungsionalnya yang kecil dan kesuburan tanahnya. Akhirnya, perangkat desa melepaskan haknya kepada masyarakat untuk dibuka usaha. Perangkat desa berharap ganjaran pahala karena pengabdian tersebut. Jadi, di Wisata Taman Ganjaran juga ada patung pahala berukuran besar di dalamnya.

Pada umumnya tanah kas desa digunakan sebagai lahan pertanian, namun hanya di Desa Ketapanrame, Kabupaten Tranwas, Kabupaten Mojokerto. Lahan perbendaharaan pedesaan seluas 2,8 hektar diubah menjadi tempat wisata baru, Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di tempat wisata Taman Ganjaran di Jalan Raya Trawas-Tretes ini pengunjung bisa menikmati panorama alam, bunga-bunga indah. Taman Ganjaran Mojokerto memang bisa menjadi alternatif kunjungan saat berkunjung ke Trawas. Kawasan terbuka ini cukup cocok untuk wisata keluarga. Namun tak sedikit remaja yang juga menikmati nuansa alam taman. Tak lain karena banyak spot foto dengan latar pemandangan alam. Selain pemandangan di pagi atau siang hari, malam hari juga tak kalah menarik. Selain itu taman ini juga memiliki beberapa wahana permainan, terdapat juga food court yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Kepala Desa Ketapanrame, Zainul Arifin, mengatakan setiap pengunjung memang bebas menikmati waktu di Taman Ghanjaran, namun hanya mengurangi iuran parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Dengan begitu, masyarakat yang datang sudah bisa menikmati

semua fasilitas yang disediakan, kecuali beberapa game yang pemasukannya berasal dari partisipasi pemilik game. Itu hanya untuk kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaan taman secara rutin.

Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas merupakan salah satu desa yang berada di wilayah tersebut pegunungan, sehingga cuaca yang sejuk bahkan di siang hari akan menambah nilai poin untuk pengembangan desa wisata. Awalnya pengembangan Wisata Taman Ganjaran ini dimulai karena Kepala Desa Ketapanrame menginginkan Desa tersebut

Ketapanrame memiliki ikon bagi komunitas PAD dan Desa PAD. Seperti itu diketahui bahwa pemerintah berpotensi untuk dijadikan sebagai tanah kas desa dilakukan oleh perangkat desa. dengan nilai manfaat yang minimal, jika ditotal aparat desa dalam satu tahun hanya menghasilkan + 14-15 juta. Dari sini muncul semacam pemikiran untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tempat istirahat kendaraan atau area permainan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perangkat desa dan ekonomi masyarakat. Konsep tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan donasi. Konsepnya berupa Taman Ganjaran, water park. atau kolam renang, balai pertemuan di depan Balai Desa Ketapanrame, rest area, food court dan pasar buah. Dengan adanya rencana pembangunan tersebut, Desa Ketapanrame menerima dana 5M dari daerah. Akhirnya dengan dana tersebut, aparat desa menetapkan bahwa tahun pertama adalah Taman Ganjaran, tahun kedua adalah waterpark atau kolam renang, tahun ketiga adalah rest area, pasar buah, dan aula pertemuan.

Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan perangkat desa pasti akan menambahkan nilai pada aspek keintiman dan kepercayaan di kedua sisi. Saat terlibat masyarakat tersebut bukan hanya satu desa tetapi merupakan perwakilan dari beberapa desa. Keterlibatan masyarakat dimaksudkan sebagai perencanaan awal melalui musrembang dibahas kepada masyarakat bahwa tahun depan akan terjadi pelaksanaan program kegiatan tertentu dan disetujui oleh masyarakat. Untuk tahun pelaksanaannya, masyarakat kembali dilibatkan dalam menentukan para pihak komunitas yang akan dilibatkan dibentuk oleh TPK. TPK merupakan Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk pengadaan barang / jasa. Dalam hal ini pemerintah desa bebas karena pemerintah desa adalah pemiliknya. Pemerintah desa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada TPK dan TPK sendiri pun dibentuk dari masyarakat. Perangkat desa berperan dalam menentukan tanggal program kegiatan disepakati dan jika ada kemajuan TPK akan melaporkannya ke kepala Desa. Hak yang diberikan ke TPK dapat berupa biaya, pembayaran biaya, pengadaan barang dan jasa, upah tenaga kerja dan pencarian kerja. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa TPK akan membutuhkan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bisa menjadi konsultan atau akademisi yang membantu dalam mencatat perkiraan pengeluaran, analisa pengeluaran dan perhitungan konstruksi bangunan. Kemudian keputusan akhir akan disampaikan selama pembuatan laporan. Keterlibatan TPK merupakan TPK yang berfungsi dan disiapkan atas perintah Kepala Desa, dan dilaporkan ke Kepala Desa. Saat mereka melapor ke pemerintah desa, lalu pemerintah desa juga menyampaikan hak desa. Desa mewakili otoritasnya untuk mengelola BUMDES. Dalam hal ini BUMDES juga terlibat Karangtaruna dan masyarakat.

Informan pertama bernama pak Budi, beliau warga asli daerah tersebut dan membuka stand makanan di Taman Ganjaran, Pak Budi menceritakan sedikit sejarah mengenai Taman Ganjaran, Ghanjaran diartikan oleh warga Ketapanrame untuk menyebut tanah yang dikelola atau diperuntukkan bagi perangkat desa. Kalau bahasa pemerintahan disebutnya tanah kas desa. Pak Budi melanjutkan dengan dibangunnya Taman Ganjaran sangat membantu perekonomian warga sekitar, banyak warga sekitar yang memanfaatkan dengan dibangunnya Taman Ganjaran seperti membuka stand, berjualan di sekitar taman.

Informan kedua bernama Bu Rosi, beliau juga membuka stand di Tamana Ganjaran, dan merupakan istri dari perangkat desa. Bu Rosi menjelaskan tahun sebelum berdirinya Taman Ganjaran untuk pemasukan pertanian, setahun hanya mampu menghasilkan Rp 15 juta. Dengan taman ini, sebulan bisa menghasilkan Rp 15-20 juta. Peningkatan ini berlipat ganda. Pendapatan mulai Rp 15-20 juta per

bulan didapat dari biaya sewa tanah untuk travel, gerai, dan tiket masuk. Hasilnya belum tentu untuk peralatan desa, distribusinya 80% untuk modal pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan hanya 20% untuk pekerja desa. Bu Rosi menambahkan, tujuan pengembangan pariwisata tidak hanya untuk meningkatkan tunjangan gaji pegawai desa. Tapi, juga untuk membangun lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame. Saat ini sudah sebanyak 300 warga yang bekerja dan membuka usaha makanan di Wisata Taman Ganjaran.

Informan ketiga adakah Bu Reni yang sudah membuka stand makanan dari awal pembukaan Wisata Taman Ganjaran. Bu Reni menjelaskan dengan dibangunnya Wisata Taman Ganjaran sangat membantu perekonomian warga sekitar. Bu Reni juga menjelaskan puncak keramaian Taman Ganjaran adalah hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Tetapi dengan adanya pandemi membuat penurunan pemasukan pada Taman Ganjaran, karena adanya peraturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial.

KESIMPULAN

Di Desa Ketapanrame, Kabupaten Trawas, kepala desa setempat menyadari bahwa kawasan desa yang berada di pegunungan berpotensi untuk dijadikan desa wisata. Oleh karena itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat maka dibangunlah Wisata Taman Ganjaran. Tidak hanya itu, dalam proses perencanaan akan dibangun juga wwaterpark atau kolam renang, rest area dan pasar buah. Dengan ketersediaan pariwisata Taman Ganjaran ini, Kepala Desa Ketapanrame mengaku perlahan naik level ekonomi kerakyatan menjadi lebih baik. Pada dasarnya membangun atau mengelola potensi pedesaan menjadi pariwisata adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Dari segi proses realisasinya juga membutuhkan keberanian dari perangkat desa atau kepala desa sendiri. Tidak mungkin Hal ini dibantah karena banyaknya kunjungan baru yang cenderung gagal menarik perhatian pengunjung atau wisata yang hanya menarik pengunjung pada awalnya pembukaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Imansari, N. and Khadiyanta, P., 2015. Penyediaan hutan kota dan Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik menurut preferensi masyarakat di kawasan pusat Kota Tangerang. *Jurnal Ruang*, 1(3), pp.101-110.
- Rivai, Veithal. 2009. *Manajemen Sumber Daya manusia Untuk Perusahaan*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sokanto, dan Budi, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Widarto, 2013. *Kepemimpinan (Leadership)*. *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta*.